

**PANDANGAN SURAT KABAR SUARA MERDEKA DALAM
POLITIK INDONESIA PERIODE TAHUN 1950-1968**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Penulisan Skripsi pada Program Studi
Pendidikan Sejarah

Oleh:

Yusuf Andre Prakoso
NIM. 2151200007

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO**

2026

MOTTO

Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlaha seakan kamu hidup selamanya

(Mahatma Gandhi)



ABSTRAK

YUSUF ANDRE PRAKOSO NIM 2151200007. Pandangan Politik Surat Kabar Suara Merdeka dalam Politik Indonesia Periode Tahun 1950-1967. Pembimbing : Ira Pramudawarhani, S.S., M.Pd. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai pandangan politik surat kabar Suara Merdeka mulai tahun 1950 hingga. 1968. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah (kualitatif) yang meliputi tahap heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran arsip artikel koran di depo arsip surat kabar Suara Merdeka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode penelitian, Suara Merdeka memiliki pandangan politik yang cenderung nasionalistik, anti-intervensi asing, dan kemandirian ekonomi. Hal ini meliputi menasionalisasi perusahaan asing, mendorong kesejahteraan rakyat untuk kepentingan negara, mendorong bentuk negara kesatuan dan kembali ke sistem presidensial, stabilitas politik dan kompromi antar-partai, dan pembangunan ekonomi serta institusi nasional. Periode ini juga meliputi situasi politik nasional dan internasional yang tidak stabil sehingga dalam menjalankan tugasnya, Suara Merdeka melakukan kompromi untuk tetap dapat beroperasi dengan tetap menjaga prinsip utama Suara Merdeka yaitu *Harian Umum untuk Mempertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia*.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sejarah Indonesia, khususnya sejarah jurnalistik yang turut serta mendampingi perjuangan negara Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Kata Kunci: Suara Merdeka, Politik, Revolusi, Pemerintahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal hingga pertengahan abad 20, berita yang diterbitkan oleh surat kabar pada umumnya masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu (Rinanda & Dona, 2023: 7). Berita yang dimuat pada masa tersebut, umumnya berkaitan kepentingan suatu bangsa atau kelompok, dan umumnya berita tersebut menguntungkan atau memandang positif kepentingan bangsa atau kelompok tersebut. Surat kabar sendiri juga memainkan peran penting dalam aktivitas politik Indonesia pada masa orde lama. Hal ini dikarenakan surat kabar dapat dicetak dalam jumlah besar dan didistribusikan dalam jangka yang luas untuk masa itu, sehingga dapat memberikan informasi dan menyampaikan pesan kepada banyak orang Di Indonesia, surat kabar sendiri sudah menjadi bagian dari pergerakan nasional dan alat propaganda kemerdekaan, ideologi, kebijakan, dan lain-lain (Arditya & Ardiyan, 2022). Pada masa orde lama, sebagian besar surat kabar secara umum dapat digolongkan menjadi 3 golongan yaitu, surat kabar berafiliasi sayap kiri (komunis, sosialis), surat kabar berafiliasi Nasionalis (PNI), dan surat kabar berafiliasi sayap kanan (Masyumi, NU) (Araf, 2022).

Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai salah satu partai terbesar ke-4 di Indonesia pada masa itu menggunakan surat kabar secara ekstensif sebagai alat propaganda. Melalui surat kabar *Harian Rakjat*, PKI menyebarkan ideologi, program kerja, janji, dan berbagai pesan partai lainnya kepada

masyarakat luas (Firdausi, 2017). PKI dan surat kabar *Harian Rakjat* menyebarkan paham marxisme dengan program-program seperti redistribusi tanah, jaminan hak untuk buruh, jaminan upah minimum, dan berbagai program lainnya. Surat kabar *Harian Rakjat* juga sering menggunakan nada pemberitaan yang provokatif terutama pada musuh kelas yaitu kelompok kapitalis dan imperialis yang ada di Indonesia, maupun dunia (Aghniya & Yuliati, 2021).

Program-program PKI ini selaras dengan program partai komunis di negara lain seperti Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok yang bersama-sama dengan PKI juga tergabung dalam organisasi Komunis Internasional (Poeze, 2011). Kepemilikan PKI atas surat kabar *Harian Rakjat*, sikap konfrontatif dengan kelompok yang tidak sepaham (terutama kelas kapitalis dan imperialis) membuat berbagai pihak berspekulasi mengenai pendanaan PKI dan surat kabar *Harian Rakjat* pada saat itu. Pendanaan pihak asing (terutama organisasi Komunis Internasional) menjadi tuduhan terhadap pendanaan PKI dan surat kabar *Harian Rakjat* (Osman, 2023).

Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai partai Islam terbesar pada masa orde lama juga memiliki surat kabar tersendiri untuk menyalurkan aspirasi partai dan mendengar suara masyarakat Islam. Melalui surat kabar *Abadi*, partai-partai Islam dapat mendengar suara Islam dari bawah dan di saat yang sama menyampaikan program kerja serta visi-misi partai. Seperti halnya surat kabar *Harian Rakjat*, surat kabar *Abadi* juga dimiliki secara langsung oleh salah satu partai Islam di Indonesia yaitu Masyumi. Maka dari itu, dalam

pemberitaan dan kolom editorialnya, surat kabar *Abadi* seringkali memfokuskan pada permasalahan terkait rakyat Indonesia yang beragama Islam, serta mengkampanyekan program kerja dan pemikiran partai Masyumi (Emalia, 2015).

Partai Nasional Indonesia (PNI) juga mehami pentingnya media cetak seperti surat kabar untuk menyebarkan informasi dan menggerakkan rakyat. Pada masa pergerakan Nasional, surat kabar menjadi salah satu saluran penting dalam menyalurkan informasi, dan menumbuhkan kesadaran nasionalisme (Said, 1988: 23-36). Pasca kemerdekaan, PNI yang dibentuk kembali pasca dibubarkan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda tidak memiliki surat kabar sendiri dan hanya mengandalkan surat kabar non-partai dalam aktivitasnya.

Pada awal tahun 1950an, PNI menyadari pentingnya kepemilikan surat kabar untuk aktivitas politik pasca partai politik lain seperti PKI dan Masyumi menggunakan surat kabar secara ekstensif dalam mengkampanyekan partai. Pada tahun 1953, PNI memutuskan untuk membentuk surat kabar yang bernama *Suluh Indonesia*. Surat kabar *Suluh Indonesia* berafiliasi dan bergerak secara langsung untuk kepentingan PNI dengan memberitakan berbagai peristiwa sesuai dengan pandangan PNI dan mengkampanyekan program serta ideologi partai (Yogiantoro, 2014).

Keberhasilan PNI dalam pemilu Indonesia pada tahun 1955 juga didorong oleh publikasi surat kabar *Suluh Indonesia* yang menjadi surat kabar dengan publikasi harian terbanyak pada tahun pasca didirikan dengan 50.000

cetakan dalam sehari. Selama masa penerbitannya (sebelum kemudian dilarang pada tahun 1965), surat kabar *Suluh Indonesia* memfokuskan pemberitaan yang condong mendukung penuh PNI atau Presiden Soekarno (yang menjadi salah satu pendiri PNI pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda). Hal ini termasuk Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dalam pemberitaannya, *Suluh Indonesia* secara ekstensif mendukung Dekrit Presiden tersebut dan kembalinya sistem pemerintahan ke sistem demokrasi presidensial. Meski terdapat surat kabar lain yang juga mendukung Dekrit Presiden 5 Juli 1959, namun penggunaan bahasa dan frekuensi pemberitaan tidak setinggi pemberitaan surat kabar *Suluh Indonesia* (Habibillah, 2022).

Berbagai surat kabar lahir pada masa orde lama baik yang secara langsung dimiliki oleh partai politik, atau yang dimiliki oleh pihak swasta. Periode ini adalah masa yang mana setiap surat kabar memiliki tingkat subjektivitas yang cukup tinggi dibandingkan dengan surat kabar masa sekarang. Pada tahun 1950, surat kabar *Suara Merdeka* berdiri sebagai salah satu surat kabar yang terbit setiap hari dengan slogan “Harian Umum untuk Mempertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia” (Salsabila & Santoso, 2021).

Melihat dari latar belakang di atas, akan dilakukan penelitian mengenai pandangan *Suara Merdeka* mengenai politik Indonesia 1950-1968. Lingkup spasial penelitian ini adalah Indonesia. Hal ini dikarenakan terget penelitian adalah mengenai pandangan surat kabar *Suara Merdeka* mengenai politik Indonesia secara keseluruhan. Lingkup temporal penelitian ini adalah tahun 1950-1968. Tahun 1950-1968 dipilih berdasarkan awal berdirinya surat kabar

Suara Merdeka, dan digantinya slogan surat kabar *Suara Merdeka* dari “Harian Umum untuk Memperkuat Ketahanan Revolusi Indonesia” menjadi “Independen, Objektif, Tanpa Prasangka”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya surat kabar *Suara Merdeka*?
2. Bagaimana perkembangan surat kabar *Suara Merdeka* dari tahun 1950 hingga 1968, dan kendala apa yang dialami surat kabar *Suara Merdeka* dalam menjalankan kegiatannya?
3. Bagaimana pandangan surat kabar *Suara Merdeka* dalam kegiatan politik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang berdirinya surat kabar *Suara Merdeka*.
2. Mengetahui perkembangan surat kabar *Suara Merdeka* dari tahun 1950 hingga 1968, dan kendala yang dialami dalam menjalankan kegiatannya.
3. Mengetahui pandangan surat kabar *Suara Merdeka* dalam kegiatan politik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi kajian mengenai sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, kajian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat mengenai keadaan dan kejadian di Indonesia, khususnya yang bersifat politik pasca kemerdekaan, serta pandangan surat kabar Suara Merdeka dalam keadaan politik tersebut.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pandangan dan posisi surat kabar Suara Merdeka dalam kegiatan politik di Indonesia hingga tahun 1968. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi acuan bagi peneliti yang ingin meneliti sejarah jurnalistik di Indonesia.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

Beberapa variabel yang ada di dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah pandangan, surat kabar, dan politik. Secara konkrit, penelitian ini akan memfokuskan pada pandangan politik sebuah surat kabar (*Suara Merdeka*) sehingga variabel dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu pandangan politik, dan surat kabar. Selain itu, variabel lainnya yang penting untuk penelitian ini adalah teori mengenai pergerakan nasional dan sosial. Keadaan ketika surat kabar *Suara Merdeka* didirikan yaitu ketika Indonesia sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan menjadi pertimbangan penting ketika penulis menganalisis pandangan surat kabar *Suara Merdeka* untuk lebih memahami subjektivitas atau bias yang ada.

1. Pandangan Politik

Said (1988: 22) dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila* berpendapat bahwa pandangan politik adalah bias atau subjektivitas seseorang (dalam buku ini insan pers) dalam menilai atau menyikapi suatu peristiwa politik. Subjektivitas ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang individu, keadaan atau situasi individu, hubungan atau relasi yang dimiliki individu, dan sebagainya. Hal tersebut seperti wartawan, redaksi, atau pemilik surat kabar, keadaan lingkungan surat kabar (bisa dalam tingkatan kota, provinsi,

atau negara), keadaan surat kabar (pendanaan, relasi baik vertikal atau horizontal), dsb. Dalam dunia pers, pandangan politik seseorang atau suatu surat kabar dapat dilihat dari penulisan artikel dan tajuk wacana (editorial).

Bias (subjektivitas) politik merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia. Subjektivitas politik akan selalu muncul dalam diri seseorang dari berbagai profesi termasuk profesi pers (Mulyana, 2002: 7-9).

Secara umum, manusia sebenarnya memiliki kecenderungan atau subjektivitas dalam menilai atau menyikapi keadaan dan kejadian di sekitarnya. Subjektivitas politik hanya merupakan satu dari berbagai subjektivitas yang dimiliki manusia. Subjektivitas politik sudah ada dalam diri manusia sepanjang manusia sudah menciptakan peradaban. Sebagai contoh, seorang pujangga kerajaan Majapahit akan menuliskan hal-hal positif dari pemerintahan raja dan cenderung menutupi kekurangan atau kesalahan raja dalam penulisan manuskrip (Sumarlina et al., 2024).

Kesadaran politik baru tumbuh dan berkembang secara luas di seluruh lapisan masyarakat (terutama dalam masyarakat kelas bawah) di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perkembangan ideologi baru, pendidikan formal yang lebih terjangkau dan merata, penemuan mesin cetak yang mempermudah diseminasi pemikiran mendorong perkembangan kesadaran politik masyarakat umum. Bersamaan dengan berkembangnya kesadaran politik, manusia dengan latar belakang dan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda-beda akan memiliki subjektivitas masing-masing sehingga menghasilkan pandangan politik (Achdian, 2015).

Kesadaran politik di Indonesia sangat berkaitan dengan pergerakan nasional. Di saat yang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kesadaran politik, kesadaran nasional juga ikut berkembang di Indonesia sehingga kehidupan politik Indonesia berkaitan erat dengan penjajahan Belanda dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pandangan politik masyarakat Indonesia (penduduk asli Hindia Belanda pada masa itu) umumnya terbelah menjadi 2 yaitu pihak yang pro terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan pihak yang anti terhadap pemerintahan Hindia Belanda dan menyuarakan kemerdekaan. Meski memiliki kesamaan etnis, beberapa masyarakat Indonesia memiliki pandangan politik yang pro dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hal ini dikarenakan pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda, beberapa masyarakat asli Indonesia memiliki kedudukan yang penting atau keuntungan materil yang tinggi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan politik individu yang dikemukakan Tribuana Said yaitu keadaan Individu (ekonomi dan sosial) (Idi, 2019).

Pemahaman mengenai pandangan politik individu, kelompok, atau entitas memerlukan analisis tidak hanya terhadap objek penelitian, namun juga faktor-faktor lain yang berkaitan dengan objek penelitian seperti latar belakang berdirinya, keadaan Indonesia pada saat itu dan lain-lain.

2. Surat Kabar

Surat Kabar menurut Taufik (1977: 3) dalam bukunya yang berjudul *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia* adalah alat untuk

menyebarkan informasi yang aktual (terbaru) menggunakan media cetak (tertulis). Surat kabar mengumpulkan peristiwa dan informasi terbaru yang terjadi di daerah, nasional, atau dunia yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Taufik (1977: 3) juga berpendapat bahwa surat kabar merupakan bagian penting dalam kehidupan politik. Melihat dari sejarah pergerakan nasional Indonesia dan perjuangan pasca kemerdekaan, Taufik (1977: 5-8) melihat surat kabar sebagai alat propaganda yang dapat mengembangkan rasa nasionalisme dan membakar semangat perjuangan.

Indonesia mulai mengenal surat kabar pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Surat kabar pertama kali didirikan di Indonesia oleh warga negara Belanda. Meski pada awalnya surat kabar yang ada di Indonesia hanya memberitakan topik yang dibutuhkan oleh penduduk Eropa, surat kabar pribumi perlahan juga mulai bermuncula di Indonesia. Surat kabar milik penduduk asli Indonesia ini menuliskan mengenai keadaan penduduk pribumi, menyebarkan berbagai ide dan pemikiran, dan sebagainya. Meski sirkulasi surat kabar pribumi tidak terlalu luas pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda karena berbagai batasan dan kurangnya literasi di masyarakat luas, namun pemikiran dan ide nasionalisme dan kemerdekaan mulai berkembang di kelompok intelektual atau penduduk asli Indonesia yang mampu membaca (Nugraha et al., 2020).

Pada masa okupasi Jepang, banyak peralatan media cetak milik perusahaan Belanda yang disita oleh pemerintahan militer Jepang dan

diberikan kepada penduduk pribumi. Hal ini dilakukan karena pemerintahan militer Jepang ingin menarik simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia. Media cetak pada masa pemerintahan militer Jepang (terutama yang mendapatkan mesin cetak hasil sitaan), diawasi dengan ketat oleh pihak Jepang dan diarahkan untuk menerbitkan hal positif tentang Jepang dan mendorong masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam program perang Jepang (Des Chandra & Wulandari, 2018).

Pasca kekalahan Jepang dan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, media cetak milik penduduk asli Indonesia mulai menerbitkan berita-berita yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, ancaman kembalinya kolonialisme, ideologi-ideologi seperti kapitalisme dan sosialisme, dan lain-lain. Pada umumnya, surat kabar pada masas awal kemerdekaan memberitakan semangat kemerdekaan dan perlawanan terhadap kembalinya penjajah (Belanda). Beberapa surat kabar juga mendorong beberapa ideologi untuk diterapkan di Indonesia seperti surat kabar *Abadi* yang mendorong ideologi Islamisme, surat kabar *Suluh Indonesia* yang mendorong paham nasionalis-sosialis, atau surat kabar *Harian Rakyat* yang mendorong ideologi sosialisme dan komunisme (Anom, 2013).

Jadi, surat kabar adalah media yang berfungsi untuk menyampaikan berita terbaru, dan juga dapat digunakan untuk menyebarkan suatu pemikiran atau ide. Meski surat kabar modern mengedepankan objektivitas dalam pemberitannya, perlu pertimbangan mendalam untuk memahami surat

kabar pada masa awal kemerdekaan karena tingkat subjektivitas yang cukup tinggi. Subjektivitas ini dapat berasal dari dalam, maupun luar surat kabar dan harus diperhatikan secara seksama.

3. Demokrasi Liberal

Periode demokrasi yang disebut demokrasi liberal di Indonesia adalah periode yang mana Indonesia menjalankan sistem demokrasi parlementer. Periode ini berlangsung dari tahun 1949 hingga tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang mana pemerintahan dibentuk oleh partai politik yang memenangkan pemilu dan membentuk koalisi dengan partai lain di parlemen (Matroji, 2002: 67). Pada periode ini, Indonesia memiliki residen sebagai kepala Negara, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sistem ini dilandaskan pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang dibentuk sebagai hasil diubahnya bentuk negara Indonesia dari Negara kesatuan menjadi Negara serikat.

Demokrasi parlementer diberlakukan dengan tujuan agar kepentingan setiap kelompok dapat terwakili di parlemen. Partai yang memenangkan pemilu (pemilik suara terbanyak) berhak untuk membentuk kabinet koalisi dengan partai lain di parlemen. Di Indonesia, demokrasi parlementer sendiri diberlakukan sebagai bagian dari transformasi bentuk negara Indonesia dari negara kesatuan menjadi serikat dan bukan karena kehendak rakyat. Tidak sedikit rakyat Indonesia yang menghendaki kembalinya sistem pemerintahan ke sistem demokrasi presidensial, dan bentuk negara kesatuan. Di saat yang sama, partai-partai yang ada di

Indonesia pada masa itu sangat terpolarisasi dan masing-masing partai lebih mendorong kepentingan partai atau pemilihnya dibandingkan kepentingan Indonesia sebagai sebuah bangsa sehingga menimbulkan ketidakstabilan politik (Irawan, 2016).

Demokrasi liberal adalah periode yang mana Indonesia menjalankan sistem pemerintahan demokrasi parlementer, dan memiliki bentuk negara serikat. Meski secara umum demokrasi parlementer dapat merepresentasikan seluruh kepentingan rakyat di parlemen, penerapannya yang bukan karena kehendak rakyat dan polarisasi partai politik di Indonesia pada masa itu menyebabkan krisis politik berkepanjangan yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan rakyat terutama ekonomi (Arta, 2020).

Pasca kemerdekaan Indonesia dan agresi militer Belanda, Indonesia berada di dalam keadaan yang terpuruk dengan berbagai permasalahan seperti ekonomi, kesehatan, pemerintahan, dan lain-lain. Di tengah keadaan ini, perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat, perubahan konstitusi demokrasi presidensial menjadi parlementer, dibentuknya uni Belanda-Indonesia yang dipak sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar melemahkan legitimasi pemerintahan Indonesia di mata rakyat. Hal ini diperparah dengan konflik antar partai di parlemen. Masing-masing partai (terutama partai besar seperti Partai Nasional Indonesia, Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia) berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi dan memerintah sesuai dengan ideologi atau kepentingan

partai. Apabila ada kebijakan yang tidak sesuai dengan ideologi partai, partai tersebut akan menarik dukungan dari kabinet sehingga kabinet secara efektif bubar (karena tidak memiliki cukup dukungan suara) dan harus membentuk kabinet baru. Hal ini terus berlanjut selama masa demokrasi liberal sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat hampir tidak ada yang bisa diselesaikan pemerintah karena kabinet yang tidak stabil dan kebijakan yang sulit ditetapkan dan dijalankan (Irawan, 2016).

4. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah sebuah pemikiran Soekarno mengenai demokrasi yang mana seluruh partai besar bergabung dalam sebuah koalisi besar pemerintah yang dipimpin oleh satu figur (Presiden) yang dibantu oleh Dewan Nasional. Periode demokrasi terpimpin ini berlangsung dari tahun 1959 hingga tahun 1965. Konsepsi demokrasi ini dicetuskan Soekarno pasca periode demokrasi parlementer yang penuh dengan ketidakstabilan politik dan pemerintahan yang lambat atau tidak dapat menyelesaikan masalah seperti permasalahan ekonomi, pendidikan, pemberontakan, dan lain-lain. Menjelang akhir tahun 1950an, Soekarno dan elemen militer bekerjasama tanpa melewati parlemen untuk menumpas pemberontakan dewan banteng di Sumatra (Indrajat, 2016).

Keberhasilan Soekarno dalam menumpas pemberontakan yang lama dibiarkan oleh pemerintahan (parlemen dan kabinet) memberikan dukungan politik dan populer dari rakyat yang menginginkan agar seluruh permasalahan bangsa dan Negara segera diselesaikan. Pasca penumpasan

pemberontakan di Sumatra, Soekarno memproklamkan konsep 'demokrasi terpimpin' dan secara efektif mengembalikan sistem demokrasi Indonesia dari demokrasi parlementer kembali menjadi demokrasi presidensial (Indrajat, 2016).

Konsep demokrasi terpimpin yang dikemukakan Soekarno, merupakan sebuah konsep yang demokrasi dijalankan dengan kepemimpinan seorang presiden sebagai pemimpin yang menaungi seluruh kepentingan dan menjalankan pemerintahan demi kepentingan bangsa dan Negara. Dalam konsep ini, kepentingan golongan (baik golongan nasionalis, agama, maupun komunis) tetap menjadi masukan, akan tetapi dalam pengambilan keputusan yang menjadi acuan adalah kepentingan bersama Indonesia. Berbagai partai yang ada di Indonesia diajak untuk bergabung dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) untuk menjadi bagian dari demokrasi terpimpin sebagai lembaga legislatif dan eksekutif (melalui partisipasi kader partai dalam kabinet) (Hamid, 2012).

Di saat yang sama, Soekarno juga membentuk Dewan Nasional yang terdiri dari kaum fungsionalis. Kaum fungsionalis ini dipilih dari beberapa latar belakang seperti golongan cendekiawan, pengusaha, petani, dll. Dewan Nasional berperan memberikan masukan terhadap kabinet yang akan menentukan kebijakan. Berbagai permasalahan yang ada juga kemudian dibahas dengan berbagai pihak yang ada di pemerintahan dan parlemen. Berbeda dengan masa demokrasi parlementer yang mana keputusan diambil

berdasarkan voting, keputusan pada masa demokrasi terpimpin diambil berdasarkan konsensus bersama setelah melalui proses diskusi dan konsultasi (musyawarah untuk mufakat). Dalam seluruh proses ini, presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan berperan sebagai pemimpin yang membimbing kabinet dan DPR agar keputusan dan kebijakan dapat segera diambil. Hal ini tentunya bertentangan dengan salah satu aspek demokrasi yaitu pemisahan secara ketat antara 3 cabang pemerintahan (dalam hal ini pemisahan antara eksekutif dan legislatif), dan non-intervensi antar cabang-cabang tersebut. Selain itu, dibentuknya DPR yang mana seluruh partai tergabung dalam sebuah koalisi besar juga menghilangkan aspek pengawasan dan berpotensi menimbulkan *unchecked power* (kekuatan yang tidak terawasi) di cabang eksekutif (Hamid, 2012).

Demokrasi terpimpin adalah konsep demokrasi yang mana seluruh partai politik tergabung dalam sebuah koalisi besar pemerintahan dan kemudian bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bersama melalui proses musyawarah untuk mencapai konsensus nasional di bawah kepemimpinan serta bimbingan presiden. Sistem ini dicetuskan sebagai respon dari kekacauan politik dan ketidakefektifan pemerintahan pada masa demokrasi parlementer (Arta, 2022).

Meski demikian, hal ini juga berdampak pada kemunduran demokrasi di Indonesia pada masa itu. Sistem demokrasi terpimpin telah mengaburkan perbedaan antara lembaga eksekutif dengan lembaga

legislatif serta secara efektif menghapuskan elemen pengawasan pemerintahan.

B. Penelitian yang Relevan

Skripsi berjudul *Polemik Landreform dan Aksi Sepihak 1964 dalam Perdebatan Pers* karya Muhammad Taufik yang dicetak tahun 1995. Skripsi ini meneliti mengenai sebuah kejadian di masyarakat dan bagaimana artikel yang dibuat dalam surat kabar mampu membentuk opini masyarakat melalui penekanan point-point yang dianggap penting dalam sebuah peristiwa sehingga point tersebut akan menjadi penting dalam persepsi masyarakat. Kejadian yang dibahas dalam skripsi ini adalah aksi sepihak dari pendukung atau simpatisan beberapa partai politik. Ketika Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disahkan tahun 1960, hal ini digunakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menarik dukungan massa ke partainya. PKI menggunakan UUPA untuk menghasut petani untuk bertindak langsung merampas tanah dari para tuan tanah dengan menyebarkan isu bahwa banyak tuan tanah yang belum melaksanakan UUPA, dan sebagian besar panitia pelaksana *landreform* melindungi kepentingan tuan tanah. Hal ini mengakibatkan munculnya aksi perampasan tanah dan pencambutan tanaman milik orang lain oleh petani, inilah yang kemudian disebut sebagai aksi sepihak. Sebagai reaksi dari aksi sepihak yang dilakukan oleh pendukung dan simpatisan PKI, pendukung partai politik dan kelompok yang tanahnya dirampas, melakukan aksi balasan seperti petani dari kalangan Nahdliyin Ulama (NU) yang membalas aksi tersebut dengan

merusak tanaman milik pendukung dan simpatisan PKI. Masing-masing partai dan kelompok kemudian menggunakan media cetak surat kabar yang mereka miliki untuk membenarkan aksi yang dilakukan oleh pendukung dan simpatisan mereka. Terlebih lagi, PKI menggunakan surat kabar yang mereka miliki untuk memaparkan pandangan dan menyerang lawan politik mereka menggunakan isu UUPA. Dalam kejadian tersebut surat kabar memiliki prespektif (dalam kasus ini prespektif tersebut berkaitan dengan kepentingan pemilik surat kabar tersebut) dan dengan menekankan prespektif tersebut dalam pemberitaan diikuti dengan fakta pendukung, maka surat kabar mampu membentuk opini masyarakat.

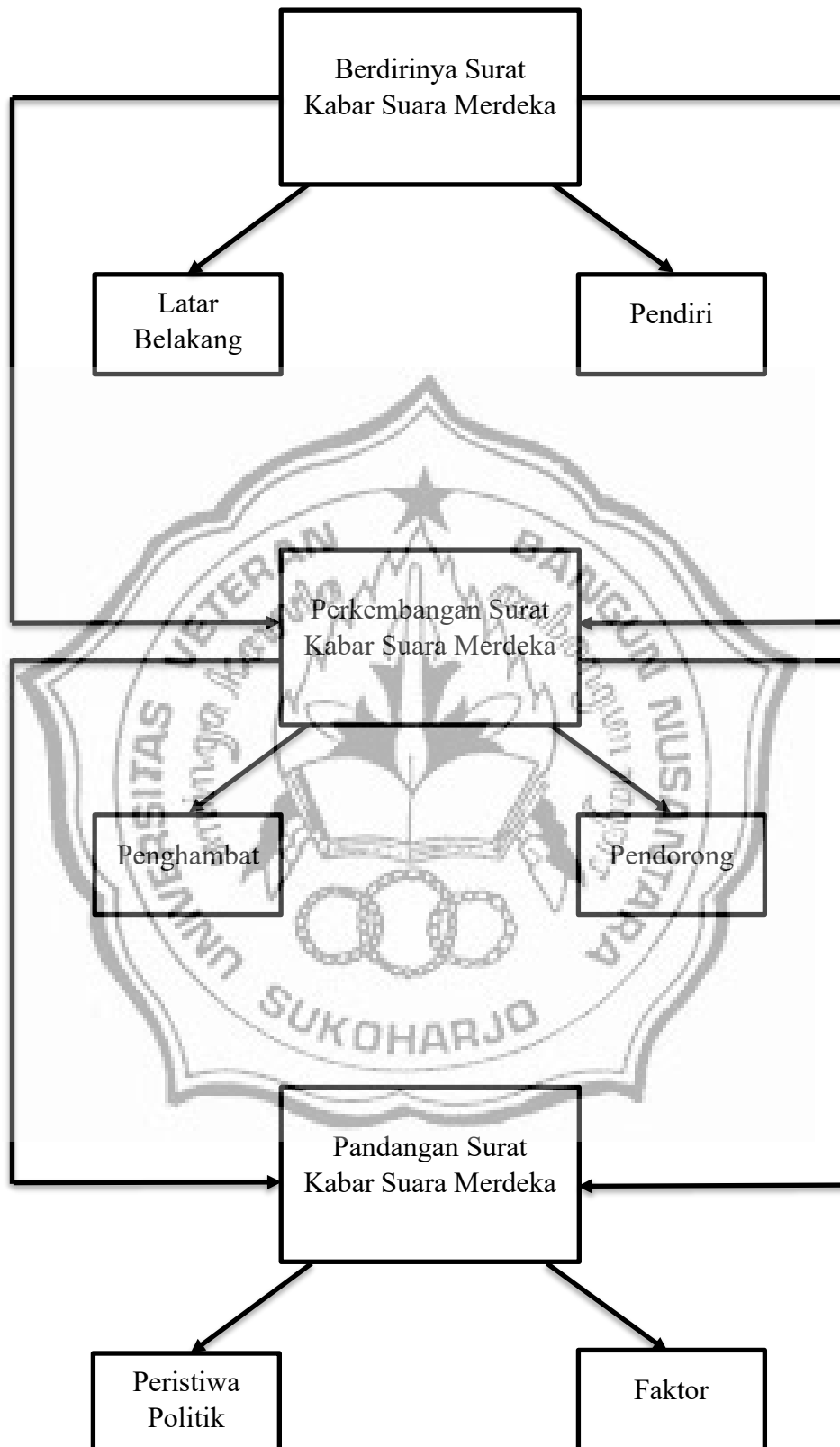
Skripsi berjudul *Pers Indonesia Masa Pendudukan Jepang* karya Dwi Widiyanti yang dicetak tahun 1996. Skripsi ini mengkaji mengenai surat kabar Asia Raya dan Suara Asia pada masa pendudukan Jepang. Kajian ini menganalisis kaitan antara surat kabar dengan kelompok penguasa (politik) pada masa tersebut. dalam skripsi ini, kaitan antara surat kabar dengan kepentingan kelompok penguasa sangat erat. Kelompok penguasa pada saat itu (Jepang) melakukan pembredelan dan sensor, serta pengawasan ketat terhadap surat kabar. Skripsi ini secara spesifik membahas 2 surat kabar pada masa tersebut yaitu Asia Raya, dan Soeara Asia. berdasarkan skripsi ini, berita-berita yang diterbitkan oleh 2 surat kabar tersebut pada masa pendudukan Jepang umumnya hal-hal yang berkaitan dengan perang dan kebijakan pemerintah pendudukan Jepang, dan bersifat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pendudukan Jepang. Meski demikian, ada beberapa berita “bernada minor”

yang berhasil lolos dari sensor yang diterbitkan oleh 2 surat kabar ini. Salah satu kesimpulan yang dicapai dalam skripsi ini adalah, selain karena sumber pendanaan (yang diberikan oleh pemerintah pendudukan Jepang) sikap represif terhadap pers dari pemerintah yang berkuasa juga mempengaruhi berita yang terbit pada masa tersebut.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah kerangka konseptual mengenai kajian utama penelitian, faktor yang mempengaruhi, variabel, dan hubungan antar variabel yang disusun secara grafis. Kerangka berpikir memiliki fungsi untuk memahami dengan cepat dan jelas alur pemikiran penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir berbentuk grafis struktural yang membahas permasalahan inti penelitian yang berjudul *Pandangan Surat Kabar Suara Merdeka dalam Politik Indonesia Periode Tahun 1950-1968*.





Tabel 3.1 Kerangka Berpikir